



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARID BACHTIAR
2. Jabatan : KEPALA KANWIL
3. NHK : 123640

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.375.000.000**

1. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/140 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL
SENDIRI Rp. 475.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 990.500.000**

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
258.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000



4. LAINNYA, PACIFIC (SEPEDA) MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
5. LAINNYA, POLYGON KALOSI HYBRID Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME IVT Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 408.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	280.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	19.788.500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.039.602.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.704.891.000
III. HUTANG	Rp.	382.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.322.391.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.